

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kota Kediri

Djoko susanto¹, Heylen Amildha Yanuarita²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received 10 November 2021 Publish 12 November 2021</p>	<p><i>People with disabilities have physical and mental disabilities that have differences when compared to normal people, therefore there needs to be special attention from the government to empower or positive activities that are useful to hone the skills of the people with stability. Therefore, the role of the government is necessary for the development of people with disabilities. Through social services empowerment of people with disabilities is more targeted and focused. The purpose of this research is to decrypt what efforts are made as well as what obstacles are faced in the empowerment of people with disabilities. The type of method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used are, observation, interview, documentation. The result of this research is that the efforts made by Social Services are social assistance for severe disabilities in the form of money, as well as training but stalled per the year 2018 because it is focused in Dipnaker. Besides, there is assistance from the ministry in the form of non-cash social assistance for all classifications of people with disabilities. There are also other supporting activities as well as UPSK from the Social Service of East Java Province.</i></p>
<p>Keywords: Empowerment Disability Government role</p>	
<p>Info Artikel</p>	<p>Abstrak</p>
<p>Article history: Diterima 10 November 2021 Publis 12 November 2021</p>	<p>Para penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik dan mental yang memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan orang-orang normal, oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk memberdayakan ataupun kegiatan yang bersifat positif yang berguna untuk mengasah kemampuan para penyandang stabilitas. Maka dari itu peran pemerintah sangatlah perlu dalam pembinaan penyandang disabilitas. Lewat Dinas Sosial pemberdayaan penyandang disabilitas lebih terarah dan fokus. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya apa yang dilakukan serta kendala apa yang dihadapi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan Dinas Sosial adalah bantuan sosial untuk disabilitas berat berupa uang, dan juga pelatihan namun terhenti pertahun 2018 karena difokuskan di Dipnaker. Selain itu terdapat bantuan dari kemensos berupa bantuan sosial non tunai untuk semua klasifikasi penyandang disabilitas. Terdapat juga kegiatan penunjang lain dan juga UPSK dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.</p>
	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p>
<p>Corresponding Author: Djoko Susanto Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri Email: djokosusanto@unik-kediri.ac.id</p>	

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang berusaha melaksanakan pembangunan di segala aspek, baik itu secara fisik yang berupa infrastruktur maupun non fisik yaitu mental dan sumber daya manusianya. Berpenduduk terbesar ke-4 di dunia setelah Amerika Serikat dan dengan jumlah penduduk ± 267 juta jiwa (sumber : Bank Dunia). Dari jumlah tersebut penduduk yang memiliki keterbatasan fisik dan mental atau istilahnya adalah disabilitas hampir mendekati

angka 9% dari jumlah dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 22 juta jiwa (sumber: Survey Penduduk Antar Sensus, SUPAS 2015).

Dalam jurnal Nasional SOCIA dijelaskan bahwa :

“Istilah difabel berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negative dan terkesan diskriminatif. Istilah difabel berdasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan ataupun ke’abnormalan”. (Sugi Rahayu, Dewi, and Ahdiyana, 2013)

Penyandang disabilitas di Indonesia masih dipandang sebelah mata, dianggap remeh karena tidak memiliki kesempurnaan secara fisik untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu. Dan rata-rata penyandang disabilitas memiliki background keluarga yang kurang mampu dan terbelakang. Dari segi kesejahteraan penyandang disabilitas sangat jauh sekali dari perhatian pemerintah dilihat sekarang mulai banyaknya peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas dari usia balita sampai manula.

Disamping itu, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pelayanan yang sama dengan orang lain dalam bidang kesehatan, administrasi kependudukan bahkan sampai pelayanan pada saat pemilu.

Hak-hak penyandang disabilitas ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-undang Dasar No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap warga negara yang berusia lanjut cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Para penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik dan mental yang memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan orang-orang normal, sehingga haruslah mendapatkan suatu pemberdayaan ataupun kegiatan yang bersifat positif untuk menambah pendapatan ataupun mengasah kemampuan. Tuntutan dari berbagai aspek kehidupan menjadi dasar bagi penyandang disabilitas untuk menjadi masyarakat yang produktif. Mereka harus terus berupaya melakukan berbagai kegiatan yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi dirinya dan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah.

Permasalahan penyandang disabilitas muncul karena adanya suatu gangguan fisik sehingga menghambat mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas baik dari bidang ekonomi, politik maupun dalam kehidupan sosial seperti orang pada umumnya. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2016 jumlah penyandang disabilitas dewasa yang tidak memiliki ketrampilan dan pekerjaan mencapai 67,33% di 9 provinsi di Indonesia (Nawir, Expose Data Penyandang Cacat Berdasarkan ICF Tahun 2009, artikel diakses pada tanggal 15 Januari 2020, dari www.kemosos.go.id). Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas masih belum produktif ataupun masih belum mendapat pemberdayaan penuh dari pemerintah ataupun dukungan moril dari lingkungan sekitar. Padahal setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Maka dari itu peran pemerintah sangatlah perlu dalam pembinaan penyandang disabilitas. Lewat Dinas Sosial pemberdayaan penyandang disabilitas lebih terarah dan fokus. Salah satu upaya pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial yaitu:

1. Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas merupakan suatu upaya untuk membantu meringankan beban dalam mencapai kesejahteraannya, dengan mendaya gunakan agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki melalui pembinaan dan pelatihan yang intensif, sehingga mereka nantinya mempunyai bekal untuk dapat hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain.
2. Bakti sosial yaitu pemberian bahan sembako seperti beras, minyak, gula, telur, mie dll. Pemberian ini digunakan untuk keperluan sehari-hari

3. Biaya hidup untuk penyandang disabilitas berat. Disabilitas berat disini adalah seorang yang lumpuh total sejak lahir dan tidak bisa beraktivitas maksimal seperti orang pada umumnya. Biaya ini berasal dari APBD Kota Kediri. Biaya hidup disini meliputi biaya makan sehari-hari, peralatan seperti: kursi roda, tongkat tunanetra.

Di Kota Kediri penyandang disabilitas ±831 orang. Rinciannya, penyandang tuna daksa sebanyak 231 orang, tuna netra 85 orang, tuna rungu dan tuna wicara 170 orang, tuna grahita 164 orang, serta yang lainnya sebanyak 181 orang (<https://www.superradio.id/kpu-kota-kediri-sosialisasikan-pemilu-2019-kepada-komunitas-disabilitas/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020). Adapun Pemerintah Kota Kediri dibantu oleh Dinas Sosial mempunyai upaya rehabilitasi sosial disabilitas yang salah satu isinya yaitu tentang bagaimana pemberdayaan penyandang disabilitas. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Kediri Dalam Memperdayakan Penyandang Disabilitas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Adi Fahrudin (Fahrudin, 2010 : 96) pengertian pemberdayaan adalah :

“Pemberdayaan dalam kajian ini merupakan upaya (dapat berupa proses, strategi, program atau metode) ditujukan untuk membangun masyarakat setempat menuju pada kondisi sosial yang lebih baik melalui pendistribusian kembali kekuatan yang dibutuhkan, dan men-*setting* menjadi symbol-simbol yang mensejahterakan mereka.”

Dalam proses pemberdayaan dibutuhkan proses pembelajaran yang berupa :

- 1) Pelatihan dan bimbingan kepekaan yang tinggi terhadap perkembangan lingkungan sosial, ekonomi, politik dan alam sekitar.
- 2) Pembelajaran dan pelatihan keterampilan fungsional yang relevan dengan kebutuhan pasar dan potensi lingkungan.
- 3) Pembinaan dan pengembangan kerjasama untuk memecahkan masalah, yaitu membawa suatu kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik.

“Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga individu tersebut memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga individu tersebut memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, selain itu mampu menjangkau sumber-sumber yang produktif yang memungkinkan individu dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa seseorang tersebut perlukan dan bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan dan tentunya bisa mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi individu tersebut.”

Sementara itu, “pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya membangun kemampuan masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tiga-p (pendampingan, penyuluhan dan pelayanan). Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan terjadi di masyarakat, dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan nonfisik yang diperlukan masyarakat.” Pawalin, (2017).

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya terhadap kemampuan agar mensejahterakan mereka dan meningkatkan pendapatnya.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). Pemberdayaan masyarakat sebenarnya adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat berpusat pada orang, melalui pemberdayaan, lewat partisipasi dan akan berkelanjutan. Dalam konsep pemberdayaan, masyarakat dipandang sebagai subyek

yang dapat melakukan perubahan, oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih dikenal dengan singkatan ACTORS (*Autority, confidence and competent, trust, opportunity, responsibility and support*). ACTORS adalah :

- 1) *Authority* artinya wewenang pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka.
- 2) *Confidence and competence* artinya rasa percaya diri dan kemampuan diri, pemberdayaan dapat diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan.
- 3) *Truth* artinya keyakinan, untuk dapat berdaya, masyarakat atau seseorang harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan.
- 4) *Opportunity* artinya kesempatan, yakni memberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
- 5) *Responsibility* artinya tanggung jawab, maksudnya yaitu perlu ditekankan adanya rasa tanggungjawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan.
- 6) *Support* artinya dukungan, adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat lebih baik.

Jadi konsep pemberdayaan ACTORS yang dikemukakan di atas suatu konsep yang harus dianut agar pemberdayaan tersebut bisa berdampak baik terhadap masyarakat, juga bisa menjadi motivasi diri terhadap seseorang. Konsep ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari suatu pemberdayaan tersebut.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuatan dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Berdasarkan pernyataan ini, pada dasarnya pemberdayaan meliputi dua kata kunci, yaitu kekuasaan dan kurang beruntung.

Menurut Dr. Adon Nasrulloh Jamaludin dikutip dari Moh. Nashir Hasan tujuan pemberdayaan ialah :

- a) Kekuasaan yaitu realitas yang terjadi di masyarakat, antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan. Kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekayaan absolut. Elite politik yang menguasai jalannya pemerintahan. Elite politik yang menguasai jalannya pemerintahan menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.
- b) Kekurang beruntungan yaitu lemahnya kekuatan yang dimiliki salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka menjadi kurang beruntung. Dengan demikian, pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung akibat dari faktor struktural, kultural, dan personal” (Jamaludin, 2015).

Adapun tujuan pemberdayaan menurut Nyoman Sumaryadi (Sumaryadi, 2005) adalah:

- a) Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, miskin, marjinal / tertinggal, kaum kecil seperti petani, buruh tani, masyarakat miskin, kaum cacat dan kelompok wanita yang diskriminasi atau disampingkan.
- b) Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Selanjutnya, Sutarto dikutip dalam Aisyiyah Anjar (Nugraheni, 2016) mengemukakan bahwa :

“Pada umumnya segala kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai suatu usaha pendidikan nonformal yang bertujuan untuk menciptakan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, lebih mapan, lebih sejahtera, dan lebih tanggap dan tanggon terhadap perubahan jaman.”

Dari pernyataan di atas sesungguhnya tujuan pemberdayaan adalah menangani masyarakat yang kurang mampu, lemah, marjinal, kaum cacat dari faktor struktural maupun personal. Untuk

memberdayakan kelompok tersebut agar kualitas hidup mereka lebih baik, sejahtera, lebih mandiri, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sendiri.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam lakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan vokasi terhadap masyarakat.

Menurut Edi Suharto {Suharto, 2014) dalam bukunya yang *berjudul* membangun masyarakat memberdayakan rakyat antara *lain*:

a) Motivasi

Dalam hubungan ini setiap keluarga harus memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu untuk mengorganisir dan melaksanakan harus memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pembahasan akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya.

b) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan. Pelatihan ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau mem bantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

c) Manajemen Diri

Setiap kelompok-kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemimpinan masyarakat. Kelompok ini kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

d) Mobilisasi Sumber Daya

Untuk memobilisasi sumber daya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela tujuan menciptakan mosal sosial. Ide ini didasar dengan pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbemya sendiri yang jika dihimpun dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

e) Pembangunan dan pengembangan jejaring.

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan bagi para nnggotanya membangun dan mempermudah jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan pengembangan berbagai akses terhadap swnber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat.

Dari kelima aspek tersebut semua aspek saling berkaitan mulai dari motivasi sampai pembangunan dan pengembangan jejaring. Strategi aspek di atas lebih menekankan tentang peningkatan kemampuan dalam upaya pemberdayaan khususnya pelatihan.

Menurut Edi Suharto yang dikutip oleh Hasan Penerupun pemberdayaan dapat dilakukan melalui 4P, yaitu pemungkinan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Pemungkinan ialah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktur yang menghambat.
- b) Perlindungan ialah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan

tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

- c) Penyokongan ialah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas di kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- d) Pemeliharaan ialah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan kesempatan berusaha. (Hasan, 2018).

Jadi terdapat beberapa pendekatan yang nantinya akan menjadikan strategi pemberdayaan tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat. Pendekatan tersebut berasal dari faktor eksternal dan faktor internal didalam diri seseorang dan dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Aziz Muslim dalam buku yang berjudul Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat dikutip oleh Aristianto, bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah :

“Pertama, tahap kesadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan kesadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya kesadaran ini dapat menggugah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.

Kedua, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Dalam tahapan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian." (Aristianto, 2018).

Sedangkan Menurut Isbandi Rukminto Adi (Adi, 2008) bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) tahap diantaranya adalah sebagai berikut;

- a. "Tahap persiapan, yaitu penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.
- b. Tahap assessment atau penilaian, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan kepada pihak pemilik dana.

- e. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat melaksanakan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama dapat terwujud. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa tidak sesuai yang diharapkan saat berada lapangan.
- f. Talrap evaluasi, pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.
- g. Tahap terminasi, tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena pemilik dana telah menghentikan bantuannya” (Adi, 2008).

Penyandang Disabilitas

Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang cacat saat ini sudah umum disebut dengan istilah penyandang disabilitas atau *difabel*. Namun karena peraturan perundang-undangan yang berlaku masih menggunakan penyandang cacat.

“Menurut Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Cacat atau penyandang disabilitas ini :

1. UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada pasal 1 atay (1) menyatakan bahwa secara yuridis pengertian penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan / atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya, yang terdiri dari cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental. Untuk selanjutnya penyandang cacat disebut sebagai penyandang difabel atau disabilitas, yang mempunyai pengertian individu yang mengalami gangguan baik sjak lahir maupn setelahnya, meliputi keterbatasan fisik maupun mental sehingga mengganggu aktivitas, dan mengalami keterbatasan fisik maupun mental sehingga mengganggu aktivitas, dan mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi.
2. Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional terhadap Konvensi (Resolusi PBB 61/106 13 Desember 2006), mendefinisikan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan / atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
4. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (RPO) mendefinisikan disabilitas sebagai basil interaksi antara penyandang ketunaan dengan hambatan sikap dan hambatan lingkungan yang menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dengan orang-orang lain di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan. Pengertian dari CRPD tersebut mengindikasikan bahwa disabilitas bukan merupakan suatu hambatan bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik untuk melakukan berbagai aktifitas seperti layaknya orang normal. Hanya saja mereka memiliki cara yang berbeda dalam melakukan aktifitas tersebut(Saputro et al., 2015)"

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka istilah penyandang disabilitas bisa diartikan sebagai orang yang mempunyai keterbatasan mental, fisik, intelektual maupun sensorik yang dialami dalam jangka waktu lama.

Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas bukan hanya lahir secara cacat fisik saja namun terdapat kecacatan secara mental, emosional, daya fikir. Secara lebih detail, berikut macam-macam klasifikasi penyandang disabilitas.

Table Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Tipe	Nama	Jenis	Pengertian
A	Tuna Netra	Disabilitas fisik	Tidak dapat melihat, buta
B	Tuna Rungu	Disabilitas fisik	Tidak dapat mendengar, tuli
C	Tuna Wicara	Disabilitas fisik	Tidak dapat berbicara, bisu
D	Tuna Wicara	Disabilitas fisik	Cacat tubuh
E1	Tuna Laras	Disabilitas fisik	Cacat suara dan nada
E2	Tuna Laras	Disabilitas mental	Sukar mengen dalikan emosi dan sosial
F	Tuna Grahita	Disabilitas mental	Cacat, pikiran, lemah daya tangkap, idiot.
G	Tuna Ganda	Disabilitas ganda	Penderita yang memiliki lebih dari satu kecacatan

Sumber: Buku Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas:

1. Tunanetra

Menurut Kaufman & Hallahan dalam Mudjito, dkk mendefinisikan tunanetra sebagai gangguan penglihatan atau kebutaan baik sebagian maupun kebutaan total. Akurasi penglihatan kurang dari 6/60 atau tidak lagi memiliki penglihatan. Dalam hal ini tunanetra bisa diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu buta total dan lemah penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indra penglihatan maka proses pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Oleh karena itu prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat aktual dan bersuara, misalnya penggunaan tulisan braile, gambar timbul, benda model dan benda nyata. Sedangkan media yang bersuara adalah tape recorder dan peranti lunak JAWS. Untuk membantu tunanetra beraktivitas di sekolah luar biasa mereka belajar mengenai orientasi dan mobilitas. Orientasi dan mobilitas di antaranya mempelajari bagaimana tunanetra mengetahui tempat dan arah serta bagaimana menggunakan tongkat putih (tongkat khusus tunanetra yang terbuat dari aluminium).

2. Tunarungu

Yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran adalah:

- a. Gangguan pendengaran sangat ringan (27-40 dB)
- b. Gangguan pendengaran ringan (41-55 dB)
- c. Gangguan pendengaran sedang (56-70 dB)
- d. Gangguan pendengaran berat (71-90 dB)
- e. Gangguan pendengaran ekstrem/tuli (di atas 90 dB).

Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara hingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan menggunakan bahasa isyarat melalui abjad jari. Abjad Jari sendiri telah dipatenkan secara internasional sedangkan untuk isyarat berbeda-beda di setiap Negara. Saat ini di beberapa sekolah sedang dikembangkan komunikasi total yaitu cara berkomunikasi

dengan melibatkan bahasa verbal bahasa isyara dan bahasa tubuh. Individu tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak" (Saputro et al, 2015)

Sedangkan menurut Muhammad Chodzirin (Chodzirin 2013 : 20) yang dimaksud tunagrahita, tunadaksa dan tunalaras adalah:

1. Tunagrahita yaitu individu yang memiliki intelegensi yang signitikan di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Anak-anak penyandang tunagrahita memiliki keterbatasan dalam mengendahkan diri dan bersosialisasi. Rata-rata anak-anak tunagrahita mengalami penurunan intekektual pada dua bidang utama:
 - a. Fungsi intelektual, penyandang tunagrahita mengalami kesulitan belajar dari pada lainnya, khususnya dalam memahami sesuatu dan dalam berkomunikasi.
 - b. Perilaku adaftif, penyandang tunagrahita mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengurus diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, pembelajaran bagi individu tunagrahita lebih dititik beratkan pada kemampuan bina diri dan sosialisasi. Proses pembelajaran mungkin lebih dititik beratkan pada aktivitas sehari-hari atau ketrarnpilan mengurus sendiri, serta pada ketrampilan sosial seperti berinteraksi dengan penghuni rumah dan liburan bersama keluarga
2. Tunadaksa, yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetapi masih dapat ditingkatkan melalui terapi, gangguan sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik, sedangkan gangguan berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik. Proses pembelajaran pada tunadaksa disesuaikan dengan kondisi fisik yang bersakutan. Secara intelektual penyandang tunadaksa tidak memiliki hambatan dalam proses belajar, namun secara fisik mereka memiliki hambatan dalam mobilitas. Oleh karena itu lembaga pendidikan perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan mereka melakukan mobilisasi, seperti tangga berjalan atau eskalator yang memudahkan pemakai kursi roda, dan lain sebagainya.
3. Tunalaras, yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi atau kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Proses pembelajaran pada individu tunalaras diorientasikan pada pemahaman dan implementasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang ada di masyarakat. Penanaman nilai-nilai agama juga perlu ditekankan supaya mereka dapat mengendalikan emosi dan mampu berinteraksi dengan masyarakat secara baik" (Chodzirin, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang terjadi di tempat penelitian yang dikemukakan secara fakta dan bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan dianalisa yang dimulai dari proses reduksi data, serta penyajian data kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial distabilitas dan staf pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas dan komunitas penyandang distabilitas. Pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara serta observasi untuk data primer dan dokumentasi untuk data sekunder.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program dari Dinas Sosial Kota Kediri berasal dari pemerintah Kota Kediri yang terdiri dari :

- a. **Pembinaan Para Penyandang Distabilitas dan Eks Trauma**
Kegiatan yang dilakukan untuk pendayagunaan penyandang disabilitas berat (lumpuh sejak lahir) berupa bantuan yang sejumlah Rp. 500.000 / bulan / orang dengan rata-rata antara 20 – 30 orang per tahun. Program ini semua dengan Permendagri dalam Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma karena kecelakaan atau sakit (wawancara dengan Ibu Endang, Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, 10 Agustus 2021). Proses dari program ini melalui input data dari data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kemensos. Untuk pengambilan bantuan uangnya syaratnya menunjukkan KTP atau KK atau Akta Kelahiran an boleh diwakilkan (wawancara dengan Bapak Hillus, 10 Agustus 2021). Sedang pendayagunaan terhadap ekstruma degnan cara direhabilitasi khususnya yang terkait dengan mental, psikososial selama 1 – 2 minggu kemudian dirujuk ke UPT. Rehabilitasi sosial yang berada di Provinsi atau di Kemensos.
- b. **Kendala yang sering dihadapi oleh petugas adalah sulitnya berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas karena keterbatasan \nya ditambah egonya yang masih tinggi mereka menganggap dirinya masih mampu dan sudah mengerti. “Pemberdayaan menghadapi para penyandang disabilitas ini harus ekstra sabar, ulet dan hati-hati karena egonya tinggi dan cara berfikirnya terbatas” (wawancara dengan Ibu Endang, 10 Agustus 2021.**
- c. **Selain hal diatas Dinas Sosial Kota Kediri menurut Ibu Endang juga memberikan pelatihan keterampilan yang berupa : menjahit untuk disabilitas yang tuna rungu wicara, pijat untuk tuna netra, komputer untuk tuna daksa, pelatihan batik dan temun, menyablon, aksesoris flannel dan pelatihan wirausaha (dangan online) dengan cara mendatangkan para ahlinya. Setelah pelatihan, ada bantuan peralatan seperti canting, lilin, kain untuk membatik, mesin jahit dan minyak gosok untuk meminjat, alat masak dan sebagainya.**
- d. **Dinas Sosial Kota Kediri juga mengadakan kerjasama dengan para pengusaha untuk pemasaran produk dengan menggelar pameran dan workshop degnan tema parenting anak kebutuhan khusus. Disamping hal diatas adapila kegiatan untuk pelayanan sosial keliling (UPSK) yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berupa penyuluhan sosial, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan, konsultasi medik, alat bantu disabilitas dan fisio therapy. Tujuan dari kegiatan ini untuk mendeteksi dini, konsultasi dan rekomendasi penanganan permasalahan di lapangan serta mendorong dan merangsang seluruh unsur masyarakat agar bersedia berperan aktif dalam upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi para disabilitas. Unsur yang terlibat dalam kegiatan ini dari Dinas Sosial, Diperindag, Dinas Koperasidan Komifo. Sedang yang dari team dari Dinas Sosial Provinsi, UPT dan Donatur Pengusaha di Kota Kediri. Menurut Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri ada empat yaitu : Gemanurani (Tuna daksa laki-laki), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWD I), Tuna Daksa Wanita, Gerakan Tuna Rungu Wicara Indoesia (GERKATIN), dan Persatuan Tuna Netra Indoensia (PERTUNI). Organisasi tersebut mendapat bantuan sosial dari Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial. Sebesar 20 juta sampai 40 juta setiap dua tahun sekali (wawancara dengan Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.Si.**

5. KESIMPULAN

Pemberdayaan penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang berwenang di bidang kesejahteraan sosial sudah cukup baik dan memadai sesuai degnan Permendagri dalam Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Ekstrauma. Kegiatan yang lain yang berupa Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, juga telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat membantu mendeteksi diri daripada penyandang disabilitas yang ada di Kota Kediri serta merekomendasikan dari permasalahan yang ada di lapangan untuk dicari pemecahan atau jalan keluarnya dan merangsang seluruh unsur masyarakat agar mau berperan aktif dalam upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi para disabilitas. Disampiing itu Dinas Sosial Kota Kediri juga telah berhasil menggandeng pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Kediri untuk menjadi donator bagu penanganan para

penyandang disabilitas di Kota Kediri sekaligus membantu pemerataan dari produk yang dihasilkan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, IR (2008), *Intervensi Komunitas; Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Rajawali Press
- Fahrurudin, A (2010), *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguasaan Kapasitas Masyarakat Humaniora*.
- Fabrianto, R (2018), *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*, 105 [https://webchafe.googleusercontent.com / search](https://webchafe.googleusercontent.com/search).
- Jamaludin, AN (2015), *Sosiologi Pedesaan*, Pustaka Setia.
- Moeloeng, LJ. (2009), *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya.
- Nafis, LU. (2013) , *pelaksanaan Pembelajaran Agama Islambagi Penyandang Tuna Netra*, Balai Rehabilitasi Sosial Distrarasta Pemakang, IAIN Walisongo.
- Sosial, D.B.K.P.K dan P (2015), *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*.
- Sugiyono, (2015); *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R D Alfabeta*.
- Suharto, E (2014)' *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT. Refika Aditama.
- Susilowait, I (2016), *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilits*; *Lentera* 14, 224-242.